

Pengelolaan Aset Jadi Temuan

MEMPAWAH- DPRD telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah tahun 2011. Hasilnya, masalah pengelolaan aset masih mejadi salah satu item temuan BPK.

"Dalam LHP BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemkab tahun 2011, dapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Karena ada beberapa item temuan. Satu diantaranya, pengelolaan aset," terang H Amin HAM S.Sos Wakil Ketua DPRD.

Sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku, DPRD diberikan waktu selama 21 hari untuk menelaah dan mempelajari LHP BPK, guna menindaklanjutinya sesuai tupoksi lembaga DPRD.

Setelah LHP diserahkan kepada DPRD, dianjurkan Sekwan untuk memperbanyak. Kemudian disampaikan kepada seluruh anggota dewan, untuk ditelaah dan dipelajari dengan teliti.

Setelah ditelaah, DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansusk) menindaklanjuti LHP yang dimaksud. Menyelesaikan berbagai persoalan dan permasalahan yang

dianggap perlu ditindaklanjuti dalam LHP yang ada.

"LHP dipelajari dulu, jika ada hal-hal yang dianggap penting, dibahas untuk dicarikan jalan keluarnya," akunya.

Secara umum, pengelolaan keuangan Pemkab Mempawah 2011 ada peningkatan kearah yang positif. Tahun lalu, temuan hasil audit BPK relatif lebih kecil.

"Pengelolannya lebih baik dibandingkan tahun lalu. Karenanya, kita berikan apresiasi kepada Pemkab yang telah serius meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya," kata dia. Meski begitu tetap diingatkan, agar Pemerintah Pemkab mampu tuntaskan temuan dari audit BPK. Terutama masalah pengelolaan asset daerah yang belum juga tuntas.

"Tiap tahun masalah pengelolaan aset masih jadi temuan audit BPK. Perlu dibenahi dan diselesaikan dengan baik. Agar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), seperti tahun-tahun sebelumnya bisa kembali diraih," dorongnya.
(ham)